

PEKERJAAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI (Studi Deskriptif Banjir Bandang di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Suwarno¹ dan Muh. Niam²

¹Mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD)

²Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UMMAD

e-mail: mn396@ummad.ac.id

Abstrak

Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh faktor hidrologi dan meteorologi yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Banjir bandang di Kecamatan Bumiaji terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi, rusaknya resapan air, serta alih fungsi lahan yang mendukung destinasi wisata alam. Penanggulangan bencana banjir bandang telah melibatkan pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media (pentahelix), profesi pekerjaan sosial menjadi pihak yang terlibat dalam memberikan layanan pertolongan, meningkatkan keberfungsian sosial, serta mendukung perubahan sosial terencana. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran praktik pekerjaan sosial dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi, khususnya banjir bang dan tanah longsor yang terjadi di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terkait pekerjaan sosial dan penanggulangan bencana hidrometeorologi. Hasil penelitian menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari bidang praktik pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial, mengatasi masalah, dan membantu keberfungsian sosial korban. Praktik pekerjaan sosial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi meliputi tiga tahapan yaitu; 1) Prabencana. Praktik pekerjaan sosial pada tahapan prabencana banjir berfokus pada upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta pengurangan resiko bencana. 2) Tanggap Darurat Bencana. Pekerjaan sosial pada tahap ini berfokus pada aksi cepat tanggap penanganan korban bencana, Kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah yang terjadi saat bencana. 3) Pascabencana. Pekerjaan sosial mengarah pada pemulihan psikososial korban dan memberikan layanan konseling, pendampingan serta pengembangan kemandirian korban bencana.

Kata kunci: *Pekerjaan sosial, Penanggulangan bencana, Banjir bandang, Bencana Hidrometeorologi*

SOCIAL WORK IN HYDROMETEOROLOGICAL DISASTER MANAGEMENT (Descriptive Study of Flash Flood in Bulukerto Village, Bumiaji, Batu City)

Abstract

Hydrometeorological disasters are disasters that are influenced by hydrological and meteorological factors which can cause disasters such as floods, landslides and tornadoes. Flash floods in Bumiaji District occurred due to quite high rainfall, damage to water catchments, and conversion of land that supports natural tourist destinations. Management of the flash flood disaster has involved the government, academics, business sector, community and media (pentahelix), the social work profession is the party involved in providing assistance services, improving social functioning, and supporting planned social change. This research aims to provide an overview of social work practices in dealing with hydrometeorological disasters, especially floods and landslides that occurred in Bulukerto Village, Bumiaji District. The research method uses a descriptive qualitative approach, data collection is carried out by observation, interviews and documentation studies

related to social work and hydrometeorological disasters. The research results confirm that disaster management is part of the field of social work practice in providing social services, overcoming problems, and helping victims' social functioning. The practice of social work in managing hydrometeorological disasters includes three stages, namely; 1) Pre-disaster. Social work practices in the pre-disaster flood stage focus on efforts to prevent, prepare and reduce disaster risk. 2) Disaster Emergency Response. Social work at this stage focuses on quick response actions for handling disaster victims. Collaboration and coordination with various parties is an important part in providing needs and solving problems that occur during disasters. 3) Post-disaster. Social work aims at psychosocial recovery of victims and providing counseling services, assistance and developing the independence of disaster victims.

Keywords: Social work, Disaster management, Flash floods, Hydrometeorological disasters

PENDAHULUAN

Bencana yang melanda wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari faktor alam dan manusianya. Secara Geografis, wilayah NKRI yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik aktif, dan jalur pegunungan aktif. Kondisi fisiografis Indonesia dipengaruhi aktivitas tumbukan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik yang menjadikan Indonesia sebagai kawasan seismik aktif di dunia dan memiliki lebih dari 295 sumber gempa sesar aktif (Rosyida, Nurmasari, dan Suprpto, 2019; Maulana dan Andriansyah, 2024). Selain itu, Wilayah Indonesia juga terletak di garis katulistiwa yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Kondisi tersebut menjadikan wilayah NKRI berpotensi besar dan rentan terhadap ancaman bencana hidrometeorologis dan bencana geologis (Maulana & Andriansyah, 2024; Ashidiq & Puspita, 2019; Yanuarto, Utomo, & Pinuji, 2019; Rosyida, Nurmasari, & Suprpto, 2019).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan beberapa bencana dapat disebabkan oleh faktor alam (*natural disaster*) atau bahaya alam (*natural hazard*) seperti bahaya geologi (*geological hazard*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazard*), bahaya biologi (*biological hazard*), dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*), serta bencana yang disebabkan oleh faktor manusia dan lingkungan sosial seperti kerentanan yang

tinggi di masyarakat, bahaya teknologi (*technological hazard*), infrastruktur dan elemen dalam kawasan resiko bencana (bnpb.go.id, 2023; Mahardika & Larasati, 2018). Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan tiga jenis bencana yaitu; bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Kehadiran Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dan menjadi dasar pembentukan BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2008 tentang Organisasi Subbagian, Seksi, dan Subbidang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri memberikan panduan dan tatakerja lebih rinci BPBD di tingkat daerah (Maulana & Andriansyah, 2024). BNPB dan BPBD menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab serta memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana di tingkat Nasional, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dasar hukum pembentukan lembaga tersebut menyediakan secara kerangka kerja dalam merencanakan, mengkoordinasikan, serta melaksanakan upaya penanggulangan bencana pada tingkat nasional hingga daerah di

Indonesia. Hal tersebut menjadi bagian penting, mengingat bencana alam telah menjadi kejadian rutin di Indonesia. BNPB mencatat sampai tanggal 31 Desember 2021, jumlah bencana sebanyak 5.402 kejadian yang didominasi bencana banjir sebesar 1.794 yang kemudian diikuti tanah longsor (1.321) dan cuaca ekstrem (1.577). Kemudian pada akhir tahun 2022 BNPB mencatat jumlah bencana sebanyak 3.544 kejadian yang juga didominasi oleh bencana banjir sebesar 1.531 yang diikuti cuaca ekstrem (1.068) dan Tanah Longsor (634). Sedangkan pada akhir 2023, BNPB juga mencatat kenaikan jumlah bencana sebesar 5.400 kejadian yang didominasi oleh bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar 2.051 kejadian dilanjutkan cuaca ekstrem (1.261) dan bencana banjir sebesar 1.255 kejadian di berbagai wilayah di Indonesia.

Bencana hidrometeorologi merupakan jenis bencana yang mendominasi sebesar 96,8%, sisanya 3,2% merupakan bencana geologi yang menyebabkan korban meninggal, hilang, dan luka-luka, serta berbagai kerusakan lainnya. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh faktor meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, suhu, dan angin yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung (Rosyida, Nurmasari, & Suprpto, 2019; Maulana & Ardiansyah, 2024). Perubahan iklim lokal, nasional, bahkan global menjadi salah satu penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi (Rosyida, Nurmasari, & Suprpto, 2019). Bencana hidrometeorologi merupakan jenis bencana yang paling tinggi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Banjir menjadi salah satu bencana hidrometeorologi yang sering dihadapi oleh masyarakat di sekitaran wilayah aliran sungai. Banjir terjadi karena pengaruh dari berbagai faktor, seperti tingginya curah hujan, karakteristik aliran sungai dan air permukaan, kapasitas tampungan pengaliran air, kecepatan air, tingginya genangan air banjir, serta beban sediman seperti sampah (Kementerian

Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2015 dalam Ashidiq & Puspita, 2019).

Bencana banjir seringkali dianggap sesuatu yang bersifat alamiah, mendadak dan tidak bisa dicegah, akibatnya ketidaksiapan menghadapi bencana dapat mengakibatkan kerusakan lebih besar bahkan kematian. Dalam hal ini manajemen bencana menjadi proses penting dalam penanggulangan bencana. Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan berikut; 1) Pra Bencana (sebelum kejadian) meliputi; kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. 2) Saat Kejadian Bencana meliputi; tanggap darurat dan penanggulangan bencana. 3) Pasca Bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi (Mahardika & Larasati, 2018).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi dampak bencana alam (mitigasi) hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bahaya (UU Nomor 24 tahun 2007). Mitigasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktural (melibatkan pembangunan fisik seperti waduk, bangunan tahan bencana) dan non-struktural (melibatkan kebijakan dan peraturan) (Maulana & Ardiansyah, 2024). Beberapa upaya mitigasi yang dilakukan untuk mencegah serta mengurangi bencana banjir yang terjadi.

Kondisi geografis daerah di Indonesia yang beragam mulai dari suatu daerah yang terletak di dataran tinggi atau dataran rendah, namun juga ada suatu daerah yang memiliki dataran rendah dan juga dataran tinggi. Kondisi tersebut yang menyebabkan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi bencana alam yang tinggi (Mahardika & Larasati, 2018). Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang cukup besar tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi seperti ancaman gelombang

pasang sepanjang pesisir pantai selatan pulau Jawa, bencana banjir bandang dan tanah longsor. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar terjadinya bencana hidrometeorologi di Jawa Timur yaitu Kota Batu yang sebagian besar wilayahnya dilengser pegunungan, gunung Panderman, dan gunung Arjuno serta dibelah oleh aliran Sungai Brantas.

Berdasarkan data BPBD Kota Batu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor telah mendominasi berbagai kejadian bencana di Kota Batu, BPBD Kota Batu mencatat pada tahun 2020 terjadi 114 bencana, tahun 2021 terjadi 154 bencana, tahun 2022 sebesar 196 kejadian bencana yang didominasi bencana banjir, tanah longsor yang diikuti berbagai kerusakan lingkungan lainnya (tugumalang.id, 2022). Banjir bandang di Kota Batu dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di lereng Gunung Arjuno yang mengalir sangat deras dengan membawa material lumpur, batu, potongan pohon serta puing bangunan (Arifin, 2021; kominfo.jatimprov.go.id, 2021). Banjir bandang di Kota Batu diantaranya berdampak pada 6 desa di Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang meliputi Desa Bumiaji, Desa Sumber Brantas, Desa Bulukerto, Desa Tulungrejo, Desa Punten, dan Desa Sidomulyo (Wismabrata, 2021).

Kecamatan Bumiaji menurut kepala BPBD Kota Batu menjadi wilayah yang paling rawan mengalami bencana alam karena berada di dataran tinggi yang memiliki banyak lereng dan tebing, serta beberapa wilayah memiliki cekungan dan retensi yang berpotensi terjadinya bencana alam (Ibrahim, 2022). Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, terjadinya banjir bandang di beberapa titik tersebut juga terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi dan diperparah dengan daerah resapan air di hulu yang sudah rusak (Wismabrata, 2021). Kondisi tersebut diperkuat dengan banyaknya pembukaan alih fungsi lahan sebagai destinasi wisata baru dan penunjangnya di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Alih fungsi lahan untuk bangunan telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 42 ayat (1) terkait dengan rencana tata ruang dilaksanakan dan ditegaskan dengan mengacu pada upaya pengurangan resiko bencana, mulai dari penerapan peraturan kebijakan, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Wakil Walikota Batu yang juga sebagai Ketua Tim Tanggap Darurat Banjir Bandang Kota Batu menjelaskan upaya pencegahan banjir terulang teah menggandeng pihak Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap alam (Wismabrata, 2021). Upaya mitigasi bencana merupakan langkah krusial yang diperlukan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media dalam kerja bersama (pentahelix) untuk mengurangi resiko bencana (Maulana & Andriansyah, 2024; Pasaribu, Apsari, & Sulastri, 2023).

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 pasal 27 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak melakukan kegiatan penanggulangan bencana”. Profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting dengan karakteristik utama praktik pekerjaan sosial yang menekankan pada “individu dan interaksinya dengan lingkungan” dapat diterapkan dengan baik dalam proses kegiatan penanggulangan bencana (Tukino, 2013). Keterlibatan pekerja sosial dalam memberikan layanan tidak hanya berfokus pada individu, namun juga keluarga dan lingkungan sosialnya (Niam, 2023). Sehingga tujuan pekerjaan sosial dalam memberikan layanan pertolongan dalam meningkatkan kebefungsian sosial dapat berperan dan menjadi bagian penting dalam menciptakan perubahan sosial secara terencana (Santoso, Irfan, & Nurwati, 2020).

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah menyebabkan berbagai kerugian, kolaborasi pentahelix menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana hidrometeorologi.

Khususnya pekerjaan sosial memiliki keterlibatan dalam membantu korban atau penerima manfaat berfungsi kembali secara normal baik secara sosial maupun psikisnya (Anita, Salsabila, & Alhabsyie, 2021). Pekerjaan sosial dalam mitigasi bencana hidrometeorologi senantiasa berkolaborasi dengan *stakeholders*, khususnya *local leader* yang memiliki peran dalam mengambil keputusan mitigasi bencana, menghubungkan bantuan pemerintah dan non-pemerintah, mengumpulkan dan menyalurkan bantuan, serta memonitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana.

Kolaborasi pentahelix menjadi upaya penting dalam mitigasi bencana hidrometeorologi, pekerjaan sosial dapat berkontribusi dan berperan pada setiap proses penanggulangan bencana. Mengacu pada kejadian bencana hidrometeorologi khususnya banjir bandang yang terjadi di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu, maka, pada kesempatan ini berusaha menelaah lebih lanjut gambaran pekerjaan sosial dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan informasi terkait dengan pekerjaan sosial dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung peneliti saat kejadian bencana di Desa Bulukerto tahun 2021-2022. Wawancara dilakukan perangkat Desa Bulukerto, Ketua Ikatan Sakti Peksos Indonesia (ISPI) Jawa Timur, Relawan Sosial, serta warga terdampak bencana dari desa Bulukerto. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber terkait berupa karya tulis ilmiah terdahulu yang telah dipublikasikan pada google scholar atau media daring lainnya (*internet sources*) yang berkaitan dengan

pekerjaan sosial dan penanggulangan bencana hidrometeorologi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, klasifikasi, dan membandingkan data satu dengan lainnya untuk dilakukan analisa dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada bagian ini disajikan dalam dua pembahasan, yaitu gambaran umum bencana hidrometeorologi khususnya banjir bandang dan pekerjaan sosial dalam bencana hidrometeorologi di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

A. Gambaran Umum Bencana Hidrometeorologi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Kecamatan Bumiaji menjadi wilayah terluas dengan luas 12,99 km² atau sekitar 64,28% total luas keseluruhan Kota Batu, jumlah dusun di Kecamatan Bumiaji menjadi terbanyak di Kota Batu berjumlah 37 dusun dengan 431 RT dan 84 RW. Kecamatan Bumiaji memiliki topografi wilayah pegunungan dan perbukitan. Kecamatan Bumiaji jug menjadi jantung Kota Batu yang memiliki peran vital dan strategis sebagai pusat perekonomian dengan pemandangan alam yang sangat indah di Kecamatan Bumiaji, sehingga banyak ditemui tempat-tempat wisata alam pegunungan (BPS, 2022).

Potensi alam di wilayah Kecamatan Bumiaji dapat mendatangkan manfaat dalam kehidupan manusia, namun kondisi geografi dan topografi wilayah Kecamatan Bumiaji juga berpotensi terjadi bencana alam yang memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat. Tingginya curah hujan serta perubahan iklim yang terjadi menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung. Bencana Hidrometeorologi merupakan bencana yang disebabkan oleh rusaknya sistem dalam siklus hidrologi yang mempengaruhi kestabilan kondisi iklim dan cadangan air di permukaan bumi (Rosyida, Nurmasari, & Suprpto, 2019).

Perkembangan Kecamatan Bumiaji sebagai pusat perekonomian telah diikuti berbagai perubahan alih fungsi lahan untuk pengembangan tempat wisata alam dan perkebunan masyarakat, kondisi tersebut harus diikuti tata kelola yang baik agar terhindar dari peningkatan potensi bencana alam akibat alih fungsi lahan yang mempengaruhi kestabilan iklim dan lingkungan.

Kejadian bencana banjir bandang dan tanah longsor tahun 2021 menjadi satu momentum yang melekat dalam ingatan masyarakat Kota Batu, khususnya di Kecamatan Bumiaji. Hingga tahun 2022 tragedi banjir bandang masih menghantui dan memunculkan trauma ketika musim hujan terjadi hujan deras di masyarakat Kecamatan Bumiaji, khususnya di Desa Bulukerto. (Ibrahim, 2022; Sampurno, 2022). Tragedi banjir bandang di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji merupakan suatu kejadian yang mengguncang masyarakat Desa Bulukerto, karena bencana banjir bandang yang terjadi sangat cepat dan tidak terduga.

Kejadian banjir bandang yang terjadi disampaikan salah satu warga terdampak banjir SN sebagai berikut; “Iha pada saat banjir itu tidak sesuai perkiraan, biasanya air itu lewat jalan tidak besar, Iha pada saat itu air bah lewat depan itu campur lumpur dan kayu *dongkelan* pohon, teras rumah saya *doyong* lumpur masuk, waduh meja, kursi, tempat tidur pupuk banyak lagi pokoknya” (Hasil wawancara SN).

Tragedi bencana banjir bandang di Desa Bulukerto terjadi ditandai hujan deras pada siang hari yang mendatangkan aliran air disertai lumpur, kayu-kayu, dan bebatuan melalui jalur sungai yang biasanya kering tidak mampu menampung luapan air anak Sungai Brantas. Faktor lingkungan yaitu daerah resapan air yang rusak di daerah hulu di hutan lereng Gunung Arjuno yang menyebabkan banyaknya erosi tanah dan batu serta aliran sungai dan drainase yang kecil (Hartik & Kurniati, 2021; Sampurno, 2022). Tingginya curah hujan serta terganggunya siklus hidrologi daerah hulu

lereng Gunung Arjuno menambah luapan air, drainase yang sempit tidak mampu menampung aliran air yang menyebabkan luapan air beserta lumpur dan kayu-kayu telah memenuhi beberapa rumah warga dipinggiran aliran sungai di Desa Bulukerto.

Kondisi tersebut juga disampaikan oleh informan YK yang merupakan perangkat Desa Bulukerto sebagai berikut; “...penumpahan air yang tidak pada tempatnya biasanya air itu kan lewat dari atas dari jalan itu menuju ke bawah tapi ini ternyata lewat jalur sungai yang biasanya sungai itu kering memang enggak ada airnya tapi tahu-tahu tidak muat dengan adanya limpahan air yang bercampur dengan batang- batang kayu *dongkel-dongkelan*” (Wawancara Perangkat Desa Bulukerto, YK).

Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (Ashidiq dan Puspita, 2019). Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia seperti: berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai (Yanuarto, Utomo, dan Pinuji, 2019). Perkembangan kehidupan manusia, kerusakan lingkungan, serta perubahan iklim yang terjadi menjadi unsur penting dalam memahami bencana hidrometeorologi.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 1 Kondisi Rumah Warga Korban Banjir Bandang di Dusun Gintung Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Penanggulangan bencana banjir bandang telah menjadi tanggung jawab sebagai pihak, namun begitu, masyarakat Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji yang tinggal di daerah rawan bencana selalu menjadi pihak pertama saat terjadi bencana. Berbagai upaya yang dilakukan harus atas inisiatif masyarakat sendiri, seperti yang disampaikan oleh informan S saat terjadi tragedi banjir bandang di Desa Bulukerto berikut ini; “pada waktu bencana cuma tetangga kanan kiri dan warga dusun satu kampung *niki* saling tolong menolong, ya ada yang bantu mengemasi barang barang, *ngangkati* perabotan..... baru pada saat sudah reda *nggih* terang, baru *wonten* bantuan *saking* Kota Batu *saking* SAR nek mboten salah waktu niko terus kalian rencang rencang katha baru tahu niku tas dugi yang *saking* Kota Malang” (Wawancara dengan S).

Kejadian banjir bandang Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji memberikan gambaran masyarakat sebagai subjek dan juga objek dalam penanggulangan bencana. Pengalaman masyarakat Desa Bulukerto dalam menghadapi bencana menjadi suatu pembelajaran yang membentuk persepsi masyarakat terhadap bencana, sehingga mampu menciptakan kemampuan adaptif lokal dalam penanggulangan bencana (Falihin et al., 2021). Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk berkolaborasi secara internal maupun eksternal dalam membangun sistem peringatan dini secara swadaya dan swadana, dan masyarakat harus memiliki sistem dan struktur untuk mitigasi bencana hidrometeorologi (Pandara et al., 2023). Pengalaman mitigasi bencana masyarakat Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu menjadi pengetahuan dan modal utama untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana kedepannya.

Pengurangan resiko bencana dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat tentang ancaman

bahaya bencana alam, keterlibatan tokoh masyarakat dapat menjadi solusi meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan mengajak dan meyakinkan masyarakat (Rosyida, Nurmasari, & Suprpto, 2019). Peran penting masyarakat dan *stakeholders* di Kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam mitigasi bencana juga harus diikuti kolaborasi pentahelix melibatkan pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media dalam penanggulangan bencana.



Sumber: kompas.id, 2022

Gambar 2 Rehabilitasi pelebaran Kali Sambong Desa Bulukerto

Banjir bandang berakibat pada kerusakan dan kehilangan harta benda hingga kematian, bahkan beberapa masyarakat terdampak juga mengalami trauma kejadian serupa ketika memasuki musim hujan. Namun begitu, berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi dampak dari bencana banjir bandang yang telah terjadi. Perbaikan tata letak pemukiman masyarakat dan juga pelebaran drainase menjadi salah satu upaya dalam mengatasi salah satu sumber terjadinya banjir bandang. Selain itu, menjelang musim hujan di Kecamatan Bumiaji telah diturunkan 67 personel tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Batu, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Tahura Raden Soerjo, Perhutani, Perangkat Kecamatan Bumiaji, Perangkat Desa Bulukerto, dan relawan melakukan penyusuran sungai dari Taman Gunung Pucung di Desa Bulukerto untuk mengetahui kondisi sepanjang aliran sungai menjelang musim hujan (Ulum, 2023). Penyusuran sungai tersebut sebagai upaya mencegah bendungan alam yang

terbentuk karena tumpukan kayu-kayu hasil pemotongan atau pohon yang tumbang (Ibrahim, 2022). Mengingat kondisi aliran sungai dari hulu hingga hilir di Kecamatan Bumiaji mengindikasikan sebab meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

B. Pekerjaan Sosial dalam Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah telah menjadi amanat dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, Kelembagaan pemerintah (BNPB dan BPBD), Lembaga usaha, Lembaga Internasional. Kolaborasi pentahelix merupakan model pengembangan kolaboratif komprehensif yang melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media menjadi upaya penting dalam penanganan bencana (Pasaribu, Apsari, & Sulastri, 2023). Melihat tragedi kebencanaan yang terjadi dapat dipastikan adanya faktor-faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan adanya bencana yang bersifat fisik maupun nonfisik, oleh karena itu kolaborasi berbagai pihak multidisipliner sudah pasti diperlukan. Dalam pembahasan ini akan memfokuskan pada salah satu bidang yaitu pekerjaan sosial yang turut berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Pekerja sosial (*social worker*) dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial (*social work*) seharusnya mendapatkan pengakuan di masyarakat, khususnya setelah disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 4 menyebutkan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial diantaranya yaitu; Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.

Pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kepedulian dalam praktik pekerjaan sosial, serta memiliki sertifikat kompetensi.

Praktik pekerjaan sosial dalam penyelenggaraan pertolongan profesional dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah disebutkan pada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Buku saku pekerja sosial menyebutkan sedikitnya 11 ruang lingkup bidang praktik pekerjaan sosial, salah satunya yaitu “penanggulangan bencana (*disaster management*) merupakan proses dinamis, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan (*preparedness*), mitigasi, tanggap darurat (*respon*), rehabilitasi (*rehabilitation*) atau evakuasi dan pembangunan kembali (*development*) (IPSPI, 2022). Sehingga pekerjaan sosial dalam setting kebencanaan meliputi berbagai kegiatan dari prabencana, saat terjadi bencana, hingga pascabencana.

Berdasarkan tragedi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu memberikan gambaran faktor-faktor penyebab dan dampak terjadinya bencana yang menyentuh berbagai aspek fisik dan nonfisik dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Bagi masyarakat korban terdampak banjir bandang tidak hanya kehilangan dan kerusakan harta benda, namun juga memunculkan trauma datangnya banjir bandang ketika memasuki musim penghujan. Kondisi tersebut menunjukkan bidang pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan, mengatasi masalah, dan membantu keberfungsian sosial, sehingga kompetensi praktik pekerjaan sosial yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam penanggulangan bencana menjadi bagian penting.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terperinci telah termuat dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008

meliputi tiga tahapan kegiatan yaitu; Prabencana, Tanggap darurat bencana, dan Pascabencana;

1. Prabencana

Bencana banjir bandang yang merupakan salah satu jenis bencana hidrometeorologi pada umumnya terjadi pada saat musim hujan dengan curah hujan tinggi sehingga luapan air melebihi kapasitas daya tampung aliran air hujan. Bencana banjir bandang bukan hanya karena faktor alami (iklim dan cuaca) namun juga faktor manusia dan lingkungannya. Banjir bandang yang terjadi di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji merupakan bencana yang tidak terduga oleh masyarakat, tragedi bencana banjir bandang tersebut terindikasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu; Sungai atau drainase yang sempit, Daerah resapan air yang rusak di daerah hulu di hutan lereng Gunung Arjuno, Alih fungsi lahan untuk pemukiman, objek wisata, perkebunan dan pertanian yang menunjang potensi wisata di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Bencana banjir merupakan bencana yang bersifat lokal, sehingga pemahaman terhadap kondisi lingkungan menjadi modal penting dalam penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 meliputi dua situasi; 1) Situasi tidak terjadi bencana, meliputi; perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana dan 2) Dalam situasi terdapat potensi bencana meliputi; Kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Berbagai upaya yang dilakukan pada tahap prabencana mengarah pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ketika terjadi bencana.

BNPB dan BPBD sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan

tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi beberapa upaya pencegahan seperti: a) Mitigasi dibuktikan dengan Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) berbasis masyarakat dalam menghadapi bencana. b) Kesiapsiagaan terdiri dari: Rencana Kontingensi yang bertujuan sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, Membuat peta rawan bencana dan resiko bencana. c) Peringatan Dini (Mahardika dan Setianingsih, 2018). Beberapa upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi bencana banjir diantaranya yaitu; a) Adanya sosialisasi larangan pembuangan sampah sembarangan; b) Pembentukan kelurahan siaga bencana dan tanggap bencana di daerah rawan banjir; c) Pemetaan daerah rawan banjir; d) Menghindari pembangunan di daerah aliran sungai; e) Pembuatan drainase yang baik di sekitar pekarangan rumah (Dyah, Pinuji, & Ikhwanudin, 2023).

Praktik pekerjaan sosial pada tahapan prabencana banjir berfokus pada upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta pengurangan resiko bencana. Mengingat bencana hidrometeorologi khususnya banjir yang sering terjadi saat musim hujan, tahapan prabencana harus dirumuskan dengan baik sesuai kondisi lingkungan masyarakat. Pekerjaan sosial dalam upaya pengurangan resiko bencana diantaranya yaitu; a) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberian informasi kerawanan, bahaya, dan resiko bencana; b) Pemetaan Kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan resiko bencana; c) Bersama masyarakat membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan pada tingkat lokal; d) Melakukan advokasi pada tataran kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana (Tukino, 2013). Upaya startegis pencegahan terjadinya bencana juga bisa dilakukan dengan pendidikan dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal

masyarakat (Raharjo, 2013). Kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan hubungan manusia dan alam biasanya dalam bentuk cerita-cerita yang dituturkan oleh masyarakat, larangan atau pantangan yang merupakan upaya menjaga kestabilan alam, serta sikap dan perilaku manusia yang selaras dengan alam menjadi kearifan lokal yang dapat mencegah terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, pekerjaan sosial pada tahapan prabencana senantiasa melibatkan dan atau bekerja bersama masyarakat, mengingat masyarakatlah yang seharusnya lebih memahami kondisi terbaiknya.

2. Tanggap Darurat Bencana

Tahapan yang seringkali menjadi perhatian banyak pihak adalah saat terjadinya bencana, dilanjutkan munculnya berbagai bantuan dan layanan di lokasi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat telah disebutkan secara rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, yang secara umum meliputi; Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumberdaya; Penentuan status keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap kelompok rentan; Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Tahapan tanggap darurat sesuai kewenangan dan dibawah kendali BNPB dan BPBD.

Kejadian bencana banjir bandang di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji oleh masyarakat dipandang sebagai kejadian diluar dugaan datangnya air melalui jalur sungai yang biasanya kering, kondisi tersebut memaksa masyarakat untuk mulai evakuasi secara mandiri dilanjutkan koodinasi antar pihak dibantu penggunaan media untuk sebaran informasi siaga pada setiap anggota keluarga. Respon dan kepedulian antar masyarakat yang tanggap adanya bencana dengan melakukan proses evakuasi mandiri dan penyebaran informasi merupakan tindakan mendesak dan tepat dilakukan untuk menghindari dampak banjir bandang.

Bantuan dari pihak luar mulai berdatangan dengan cepat, seperti yang disampaikan oleh Perangkat Desa Bulukerto YK sebagai berikut; “Alhamdulillah saat itu dari pemerintah Kota Wisata Batu ini melalui BPBD kota Batu dan rekan-rekan Tagana dan juga anggota Destana Bulukerto sendiri sudah merapat sore hari Alhamdulillah bergerak cepat meski kondisi hujan belum reda teman-teman dari relawan ini udah sampai di sini dengan beberapa peralatan untuk evakuasi baru pada malam hari mendirikan tenda di dekat balai desa” (Wawancara YK).

Wewenang dan tanggung jawab BPBD pada tahapan tanggap darurat bencana banjir bandang di Desa Bulukerto menjadi bagian penting dalam mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Kehadiran BPBD secara cepat dan tepat dalam mengkaji lokasi bencana membantu evakuasi korban bencana, menjamin perlindungan dengan mendirikan posko di lokasi yang aman menjadi langkah awal yang tepat dalam menyelematkan nyawa dan memulihkan kesejahteraan korban bencana. Upaya mengakomodir penerimaan dan penyaluran bantuan kepada korban juga menjadi tanggung jawab bersama, seperti yang disampaikan oleh informan JA selaku Sakti Peksos berikut; “kalau tanggung jawab penerima bantuan termasuk yang mencatat itu dari rekan-rekan Sakti Peksos, Tagana, BPBD dan staf desa Bulukerto sini aja” (Wawancara JA).

Lebih lanjut, informan HA sebagai pekerja sosial menambahkan; “kami juga melakukan kegiatan identifikasi korban juga bersama dengan para relawan BPBD dan juga Tagana dan juga beberapa perangkat RT RW di desa Bulukerto selanjutnya dengan data tersebut kami juga bersama rekan-rekan BPPD kota Batu dan Tagana didampingi dengan perangkat desa setempat untuk mendistribusikan bantuan..... kami dan beberapa anggota BPBD serta Tagana kebetulan teman-teman semua dan juga koordinasi tetap dalam ranah

dan di bawah naungan rekan-rekan BPBD dan Tagana” (Wawancara Peksos, HA).

Tanggap darurat di Desa Bulukerto memiliki satu keunggulan dengan dibentuknya satu posko dan melarang pembukaan posko secara mandiri secara swakelola. Kehadiran berbagai pihak yang terlibat dalam tanggap darurat bencana banjir bandang di Desa Bulukerto senantiasa bekerja bersama dalam proses penanggulangan bencana. Pekerja sosial pada tahap tanggap darurat di Desa Bulukerto turut terlibat dalam menjaga dan membuka posko penerimaan bantuan, Menyalurkan bantuan dari penggalangan dana yang telah dilakukan, Mengkoordinir tim evakuasi keluarga korban beserta barang material, Mengidentifikasi korban dan melakukan dukungan sosial sesuai kebutuhan korban. Keterlibatan pekerja sosial disampaikan lebih lanjut oleh informan JA berikut ini;

“keterlibatan sakti peksos di tanggap bencana secara keprofesian Sakti peksos itu tidak ada instruksi khusus secara kedinasan guna menangani tanggap bencana karena tugas tanggap bencana sendiri sudah di tupokasikan pada BPBD BNPB ataupun Tagana. Sedang Sakti peksos sendiri pertama kali terjun di Kancan bencana itu berhubungan dengan dukungan sosial pada anak-anak terdampak korban bencana alam. Tetapi di dalam prakteknya di lapangan Sakti Peksos bergerak ataupun mengisi kegiatan sosial di kebencanaan itu menempel ataupun Sinergi dengan BNPB atau BPBD” (Wawancara JA).

Pekerja sosial dalam proses tahapan tanggap darurat bencana juga disampaikan lebih lanjut oleh informan HA berikut; “mendampingi mengidentifikasi korban walaupun ada dari unsur anak ataupun keluarga yang terlantar karena korban bencana tersebut maka akan kami lakukan dukungan sosial yang mereka butuhkan sesuai dengan identifikasi masalah” (Wawancara HA).

Penanganan terhadap korban bencana banjir bandang di Desa Bulukerto yang menjadi bidang pekerjaan sosial disampaikan oleh

informan diatas dilakukan dengan memberikan dukungan sosial kepada korban khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, Lansia, maupun keluarga terlantar untuk mendapatkan perlindungan dan tidak mengalami trauma atau tidak memperparah kondisi ketika berada di lokasi pengungsian. Praktik pekerjaan sosial dalam setting kebencanaan memang bukan suatu pekerjaan mudah, mengingat bencana banjir bandang yang terjadi tidak hanya berdampak pada kerusakan kondisi fisik, namun juga psikologi dan kehidupan sosial korban bencana. Hal tersebut yang menjadi fokus pekerjaan sosial dalam membantu pemulihan kondisi fisik dan penanganan psikososial dasar penanggulangan bencana.

Bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Bulukerto telah menghadirkan berbagai pihak di lokasi kebencanaan, kondisi tersebut memiliki sisi positif dan negatif dalam pandangan pekerja sosial dan atau relawan yang menjadi informan penelitian ini. Beberapa masalah atau kendala yang dihadapi diantaranya yaitu; a) Penyadaran kepada pengunjung di lokasi bencana yang masih dalam kondisi rawan bahaya, b) Data atau informasi yang kurang valid dari perangkat desa yang menyebabkan penyaluran bantuan kurang tepat dan kurang amanah, c) Keberadaan relawan sosial berbasis kelompok tertentu yang bergerak sendiri sesuai kepentingannya yang menyebabkan tumpang tindih tindakan dan bantuan tanggap bencana, d) Kesulitan dalam mengajak korban bencana untuk mengungsi, dan d) Persiapan untuk menyambut kedatangan pejabat pemerintah yang menyita waktu.

Lebih lanjut, bencana banjir bandang di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji juga menjadi magnet yang mendatangkan berbagai jenis pengunjung. Mengingat Kecamatan Bumiaji khususnya terkenal dengan wisatanya. Sehingga terdapat juga beberapa jenis pengunjung yang datang ke lokasi bencana untuk mendapatkan dokumentasi kejadian bencana, kondisi tersebut bisa menjadi

gangguan bagi pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan tanggap bencana. Bahkan menurut salah satu informan HA yang menjadi relawan, permasalahan dokumentasi kejadian bencana dapat menjadi pemicu pertentangan dan memunculkan permasalahan dua kelompok yang terlibat dalam kegiatan tanggap bencana khususnya penyaluran bantuan logistik untuk korban bencana. Namun begitu, kehadiran pengunjung dan sebaran informasi kejadian bencana juga memungkinkan terbukanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan layanan, serta donasi untuk pemulihan sarana dan prasana dapat tercukupi.

Keberhasilan tahapan tanggap darurat bencana banjir bandang di Desa Bulukerto dirasakan oleh masyarakat dan para pihak yang terlibat, sehingga dalam kurun waktu dua minggu alokasi bantuan dikhususkan untuk tahapan pascabencana. Beberapa keberhasilan tersebut diantaranya yaitu; a) Keterbukaan masyarakat untuk berkoordinasi dan sinergi dengan relawan, b) Kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam kendali BPBD sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana, c) Adanya dukungan terhadap pekerja sosial masyarakat, sakti peksos, relawan, dari dinas atau lembaga terkait, d) Bekerja bersama dan bertemu dengan teman sejawat, e) Memberikan sumbangsih tenaga, waktu, dan pikiran dalam proses penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

3. Pascabencana

Tahapan terakhir penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Bulukerto yaitu pascabencana, dimana tahapan ini ditandai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana serta ditutupnya penerimaan bantuan logistik untuk korban bencana. Namun begitu, pada tahapan ini kondisi masyarakat Desa Bulukerto juga belum berada pada kondisi normal, berbagai kerusakan dan kerentanan biopsikososial juga perlu mendapatkan perhatian. Tahapan pascabencana secara rinci telah

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang secara umum meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di lokasi terjadinya bencana. Upaya rehabilitasi bertujuan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, sedangkan upaya rekonstruksi bertujuan untuk mempercepat pembangunan kembali sarana dan prasarana serta kelembagaan masyarakat yang ada di wilayah bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana yang terjadi.

Pekerjaan sosial pada tahapan pascabencana juga fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya rehabilitasi dalam pekerjaan sosial pascabencana merupakan upaya membantu pemulihan psikososial korban bencana, sedangkan rekonstruksi dalam pekerjaan sosial pascabencana merupakan upaya membantu peningkatan fungsi pelayanan serta pengembangan kemandirian korban bencana. Pekerja sosial pada tahapan pascabencana dapat melakukan upaya pemulihan kondisi psikologis korban bencana khususnya trauma, pemulihan kondisi sosial, dan pengembangan kemandirian korban bencana (Tukino, 2013). Pemulihan psikososial bagi korban terdampak pascabencana banjir bandang berusaha membantu memulihkan kembali kondisi psikologi dan sosial pada keadaan normal, dukungan dan bantuan tersebut dapat dilakukan dengan konseling individu dan keluarga, pendampingan korban trauma, dan pelatihan pemulihan kondisi psikologis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pemulihan pascabencana yaitu *Cognitive Behavioral Therapy* dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mengubah pola pikir, sehingga diharapkan dapat menjadi pemulihan trauma pascabencana lebih efektif untuk pulih kembali (Anita, Salsabila, & Alhabsyie, 2021). Seperti yang terjadi pada beberapa masyarakat terdampak banjir bandang di Desa Bulukerto yang masih adanya trauma saat masuk musim hujan, mengingat bahwa bencana banjir bandang mengalami peningkatan intensitas pada musim penghujan.

SIMPULAN

Kecamatan Bumiaji secara geografis didominasi wilayah pegunungan dan perbukitan dapat menjadi peluang dan juga ancaman rawan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Bencana banjir bandang di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji terjadi di luar dugaan masyarakat, namun begitu, kejadian tersebut dapat dipastikan adanya faktor-faktor penyebab dan juga dampak yang ditimbulkan. Faktor alam dan kehidupan manusia menjadi sebab terjadinya banjir bandang seperti; Intensitas curah hujan yang turun, Rusaknya daerah resapan air di hutan lereng Gunung Arjuno menjadikan erosi tanah, Terganggunya siklus hidrologi yaitu kurangnya penampungan air dan aliran sungai, Drainase yang sempit tidak mampu menampung luapan air beserta lumpur, batu, dan kayu-kayu yang menghantam pemukiman masyarakat disekitar aliran sungai di Desa Bulukerto. Dampak bencana banjir bandang bukan hanya kehilangan harta benda dan kerusakan fisik, namun juga kondisi psikososial masyarakat korban bencana yang menjadi fokus pekerjaan sosial dalam setting penanggulangan bencana.

Praktik pekerjaan sosial dalam penanggulangan bencana bandang di Desa Bulukerto meliputi tiga tahapan yaitu;

1. Prabencana

Praktik pekerjaan sosial pada tahapan ini berfokus pada pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan resiko bencana yang dirumuskan dengan baik sesuai kondisi lingkungan masyarakat. Pekerjaan sosial pada tahapan prabencana meliputi; Pendidikan dan penguatan

kearifan lokal masyarakat, Pemberian informasi kerawanan, bahaya, dan resiko bencana, Pemetaan Kapasitas masyarakat, Penguatan sistem sumber penanggulangan bencana berbasis masyarakat lokal

2. Tanggap darurat bencana

Tahapan tanggap darurat membutuhkan tindakan sistematis dan tepat dalam pengulangan bencana banjir bandang. Praktik pekerjaan sosial pada tahapan ini diantaranya yaitu; Mengakomodir penerimaan dan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, Mengidentifikasi korban bencana dan memberikan dukungan sosial sesuai kebutuhan, Mendukung proses evakuasi keluarga korban dan barang meterial, Memberikan perlindungan dan pelayanan social kepada kelompok rentan, Mendukung pemulihan psikososial dasar bagi korban bencana.

3. Pascabencana

Berakhinya masa tanggap bencana menjadi pertanda masuknya tahapan pascabencana, pada tahapan ini ditandai dengan penutupn penerimaan bantuan logistik untuk korban bencana banjir bandang di Desa Bulukerto. Alokasi bantuan pada tahapan ini diperuntukkan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Pekerjaan sosial pada tahapan ini berfokus pada upaya mempercepat pemulihan psikososial korban bencana banjir bandang pada kondisi normal, Memberikan layanan konseling individu maupun keluarga, Pendampingan korban trauma, Pelatihan pemulihan psikososial korban, serta membantu meningkatkan fungsi pelayanan dan pengembangan kemandirian korban bencana banjir bandang.

DAFTAR PUSTAKA

Anita, Rindi. Salsabila, Zahrah. & Alhabsyie, Sofiyah Hadi. (2021). Peran Pekerja Sosial dalam Trauma Pasca Bencana Alam Menggunakan Pendekatan Kognitif. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*. Volume 7,

Nomor 2, h. 77-90. e-ISSN: 2716-4462. DOI: 10.33172/jmb.v7i2.707

Arifin, Danung. (2021). Banjir Bandang Kota Batu dan Banjir Kota Malang, 15 Orang Hanyut. *Bnpb.go.id*. Diakses melalui; <https://www.bnpb.go.id/berita/banjir->

bandang-kota-batu-dan-banjir-kota-malang-15-orang-hanyut

- Ashidiq, Hasbi Salman & Puspita, Iredo Bettie. (2019). Perubahan Resiko Bencana Banjir Bandang Berdasarkan Perubahan Guna Lahan dan Peningkatan Jumlah Penduduk di Wilayah Sekitar DAS Mikro Sub DAS Ciwidey Tahun 2017 dan 2036. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. Volume 10, Nomor 1 Tahun 2019. ISSN 2087-636x. hal 52-61.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Kecamatan Bumiaji dalam Angka. Katalog: 1102001.3579030
- Dyah, Tasya. Pinuji, Putri, & Ikhwanudin. (2023). Mitigasi Bencana pada Bencana Hidrometeorologi di Indonesia. *Science And Engineering National Seminar 8 (SENS 8)*.
- Hartik, Andi & Kurniati, Pytag. (2021). Dugaan Penyebab Banjir Bandang yang Tewaskan 6 Orang di Kota Batu. Kompas.com, 05/11/2021. Diakses melalui; <https://regional.kompas.com/read/2021/11/05/174600078/dugaan-penyebab-banjir-bandang-yang-tewaskan-6-orang-di-kota-batu?page=2>.
- Independen Pekerja Sosial Indonesia (IPSPI). (2022). Buku Saku Pekerja Sosial
- Ibrahim, M.Bagus. (2022). Banjir Bandang Hantui Kota Batu, Pemkot Bingung Cegah Bendungan Alam Terbentuk. detikJatim, Jumat, 04 November 2022. Diakses melalui: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6386769/banjir-bandang-hantui-kota-batu-pemkot-bingung-cegah-bendungan-alam-terbentuk>
- Kominfo.jatimprov.go.id. (2021). Banjir Bandang Terjang Kota Batu di 5 Titik Lokasi. Diakses melalui: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/banjir-bandang-terjang-kota-batu-di-5-titik-lokasi>
- Mahardika, Dio & Setianingsih, Endang Larasati. (2018). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 7 Nomor 2, h. 502-518
- Maulana, Akhmad Taufan & Andriansyah. (2024). Mitigasi Bencana di Indonesia. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Volume 3 No. 10. E-ISSN: 2798-5210, p-ISSN: 2798-5652
- Niam, Muh. (2023). Peran Pekerja Sosial Dalam Program *Assertive Community Treatment (ACT)* Bagi Orang Skizofrenia. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*. Vol 4, No 1, p. 56-70, e-ISSN 2721-6918
- Pandara, Dolfie P. Ferdy. Bobanto, Maria D. Tamuntuan, Gerald H. Kolibu, Hesky S. Mosey, Handy I.R. Ponumbol, Yuki. Unso, Kristina. (2023). Edukasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologis bagi Masyarakat terdampak Banjir di Kelurahan Tumumpa Satu dan Tumumpa Dua. *The Studies of Social Science*, Volume 05, Issue 02. Pp 07-19. P-ISSN: 2686-3111. E-ISSN: 2686-3103. DOI: <https://doi.org/10.35801/tsss.v5i2.51608>
- Pasaribu, Lina Putri. Apsari, Nurliana Cipta, & Sulastri, Sri. (2023). Kolaborasi Penta Helix dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi. *Share: Social Work Journal*. Volume 13 Nomor 1, h. 140-149. P-ISSN: 2339-0042, e-ISSN: 2528-1577. <https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909>
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Poluakan, Marcelino Vincentius. Apsari, Nurliana Cipta. & Raharjo, Santoso Tri. 2019 Kompetensi Kultural dalam Pekerjaan Sosial. *Share: Social Work Journal*. Volume 9 Nomor 1, h. 28-36. ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e). Doi: 10.24198/share.v9i1.20008
- Raharjo, Santoso T. (2013). Kearifan Lokal, Keberfungsian Sosial, dan Penanganan Bencana. *Share: Social Work Journal*. Volume 3 Nomor 3, h. 111-125. ISSN : 2339-0042
- Rosyida, Ainun. Nurmasari, Ratih & Suprpto. (2019). Analisis Perbandingan Dampak Kejadian Bencana Hidrometeorologi dan Geologi di Indonesia Dilihat dari Jumlah Korban dan Kerusakan (Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. Volume 10, Nomor 1 Tahun 2019. ISSN 2087-636x. hal 12-21.
- Sampurno, Mardi. (2022). Warga Bulukerto Trauma Sambut Musim Hujan.

- Radarmalang.jawapos.com. Minggu, 25 September 2022. Diakses melalui; <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811087491/warga-bulukerto-trauma-tukino>. (2013). Pekerjaan Sosial dalam Setting Kebencanaan. *Share: Social Work Journal*. Volume 3 Nomor 3, h. 111-125. ISSN : 2339-0042
- Tugumalang.id. 2022. BPBD Kota Batu Mencatat Tahun 2022 sebagai Tahun Kejadian Bencana Tertinggi. <https://tugumalang.id/bpbd-kota-batu-mencatat-tahun-2022-sebagai-tahun-kejadian-bencana-tertinggi/>
- Ulum, Mifatahul. (2023). Tim Gabungan Mitigasi Banjir Bandang di Kota Batu. *Redaksi, bisnis.com*. Rabu 15 November 2023. Diakses melalui; <https://surabaya.bisnis.com/read/20231115/531/1714764/tim-gabungan-mitigasi-banjir-bandang-di-kota-batu>
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Wismabrata, Michael Hangga. 2021. Tragedi Banjir Bandang Kota Batu Malang, 7 Warga Tewas dan 33 Rumah Terendam Lumpur. *Regional.kompas.com-07/11/2021*. Diakses melalui: <https://regional.kompas.com/read/2021/11/07/120656678/tragedi-banjir-bandang-kota-batu-malang-7-warga-tewas-dan-33-rumah-terendam?page=all>
- Yanuarto, Theophilus. Utomo, Andri Cipto. Dan Pinuji, Sridewanto Edi. 2019. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tanggung Menghadapi Bencana*. Edisi 4. Jakarta Timur: Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB. ISBN: 978-602-5693-05-2